PERDA PEMBERANTASAN PELACURAN, JERAT PSK SAMPAI MAKELAR DAN HIDUNG BELANG

Sabtu, 18 Maret 2017

Pemerintah Kabupaten Pasuruan tengah menggodok revisi Perda tentang pemberantasan pelacuran. Perda lama dinilai tidak efektif karena hanya menjerat PSK. Rencananya, revisi akan memperluas jangkauan sanksi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas pelacuran, termasuk penikmat dan makelar. Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Sudiono Fauzan menegaskan urgensi revisi ini karena sanksi yang ringan selama ini tidak memberikan efek jera.

Revisi Perda tersebut diharapkan dapat membuat para pelaku dan pihak yang terlibat berpikir dua kali. Tim Pansus yang dibentuk untuk membahas revisi akan melibatkan tokoh agama dan masyarakat untuk mendapatkan masukan maksimal. Kepala Satpol PP Kabupaten Pasuruan Yudha Triwdya Sasongko menyambut baik rencana revisi ini, yang dinilai dapat membuat pemberantasan prostitusi lebih efektif dan adil. Pihaknya juga mengusulkan agar revisi Perda memasukkan program pembinaan bagi PSK, makelar, dan pihak terkait.

Selama ini, Satpol PP hanya mampu menindak PSK dan tidak melibatkan pembinaan setelah mereka diamankan. Revisi Perda diharapkan dapat memperbaiki kondisi tersebut dan melibatkan dinas terkait dalam program pembinaan. Pembinaan ini bertujuan untuk mencegah PSK kembali ke profesi lama dan membantu mereka untuk beradaptasi dengan kehidupan yang lebih baik.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.